

PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT K.H. ABDUL WAHID HASYIM

Adi Muhlis

STIT Daarul Fatah Tangerang

Amuhlis87@gmail.com

ABSTRACT

From an Islamic perspective, knowledge is regarded as an integrated and unified entity encompassing both religious and secular sciences. Consequently, there is no dichotomy or discrimination in their development. This perspective is consistent with the educational thought of K.H. Abdul Wahid Hasyim, who emphasized the integration of religious knowledge and general sciences as the foundation for the reform of Islamic education to address the challenges of an ever-changing era. This study aims to examine K.H. Abdul Wahid Hasyim's concept of Islamic education and analyze its relevance to the development of contemporary education. The research employs a library research approach by reviewing and analyzing various literature sources relevant to the focus of the study. The data were collected from books, scholarly articles, academic journals, and other academic documents discussing the concept of Islamic education and the educational thought of K.H. Abdul Wahid Hasyim. The findings indicate that K.H. Abdul Wahid Hasyim's educational thought is founded upon four principal pillars: the strengthening of religious values, the development of students' potential, the cultivation of social awareness, and the promotion of nationalism. Furthermore, his educational philosophy remains highly relevant in addressing the challenges posed by globalization and the rapid advancement of science and technology, as it advocates a balanced integration of religious and general knowledge while fostering individuals with strong moral character, intellectual competence, and social responsibility.

Keywords: Educational Thought, Islamic Education, K.H. Abdul Wahid Hasyim.

ABSTRAK

Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai satu kesatuan yang mencakup ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu umum, sehingga tidak terdapat dikotomi ataupun diskriminasi dalam pengembangannya. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sebagai fondasi pembaruan

pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan perkembangan jaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim mengenai konsep pendidikan Islam serta menganalisis relevansinya terhadap perkembangan pendidikan pada masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian. Data penelitian diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen akademik yang membahas konsep pendidikan Islam dan pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan Islam menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim dibangun di atas empat pilar utama, yaitu penguatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan potensi peserta didik, pembentukan kesadaran sosial, dan penanaman semangat kebangsaan. Sedangkan Relevansi pemikiran tersebut masih sangat kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Pemikiran, Pendidikan Islam, K.H. Abdul Wahid Hasyim

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana utama untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter. Melalui proses pendidikan, seseorang memperoleh kesempatan untuk memahami berbagai hal yang sebelumnya belum diketahui, sehingga mampu meningkatkan kualitas diri dan memperluas wawasan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan pola pikir, sikap, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Sedangkan Pendidikan Islam merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman yang memiliki relevansi tinggi untuk terus dikaji secara mendalam seiring dengan perkembangan zaman, sehingga senantiasa menjadi perhatian para akademisi dan praktisi pendidikan. Urgensi tersebut muncul karena pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan manusia secara utuh melalui pengembangan potensi intelektual, spiritual, moral, emosional, dan fisik secara seimbang. Dengan landasan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendidikan Islam berupaya melahirkan individu yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah di

muka bumi. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki posisi yang strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial.¹

Dalam perspektif Islam, pengembangan ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting karena ajaran Islam mengakui dan mendorong penguasaan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu umum. Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal dikotomi ataupun diskriminasi terhadap jenis ilmu pengetahuan, melainkan memandang seluruh ilmu yang memberikan kemaslahatan sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi manusia dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pada masa kolonial Belanda, perkembangan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan akibat kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Sistem pendidikan yang dikembangkan pada masa itu lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan tenaga kerja bagi kepentingan kolonial dengan menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan rendah yang dapat dipekerjakan dengan biaya lebih murah dibandingkan tenaga kerja yang didatangkan dari Belanda.

Orientasi tersebut menjadikan pendidikan formal lebih menitikberatkan pada aspek utilitarian dan kebutuhan ekonomi daripada pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini kemudian dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi munculnya paradigma pendidikan yang berorientasi pada kepentingan material dan dunia kerja, sehingga dalam perkembangannya memunculkan berbagai persoalan dalam praktik pendidikan yang cenderung mengabaikan dimensi moral, spiritual, dan pembentukan karakter peserta didik.²

Sedangkan pada awal masa pendudukan Jepang, pemerintah militer menerapkan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia. Dibandingkan dengan kebijakan pendidikan pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam memperoleh ruang yang relatif lebih luas untuk berkembang. Sikap tersebut bukan semata-mata didasarkan pada perhatian terhadap perkembangan agama, melainkan lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dan strategi Jepang dalam

¹ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. 1, h. iii.

² Mansur dkk, *Rekonsruksi Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2005), hal. 51-52.

memperoleh dukungan masyarakat guna memperkuat kekuasaannya serta menunjang kepentingan perang.

Oleh karena itu, para ulama dan tokoh agama diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan lembaga dan aktivitas pendidikan Islam. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan adalah perubahan lembaga urusan agama dari Kantoer voor Islamitische Zaken, yang pada masa pemerintahan Belanda dipimpin oleh kalangan orientalis, menjadi Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang dipimpin oleh K.H. M. Hasyim Asy'ari. Selain itu, pemerintah Jepang juga membentuk kantor-kantor urusan agama di tingkat daerah yang dikenal sebagai Shumuka sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dengan umat Islam sekaligus memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai wilayah.

Menurut Zamakhsyari sebagaimana dikutip dalam *Seri Buku Tempo*, K.H. M. Hasyim Asy'ari kemudian mempercayakan kepemimpinan Shumubu kepada putranya, K.H. Abdul Wahid Hasyim. Dalam menjalankan amanah tersebut, Wahid Hasyim memusatkan perhatian pada upaya memperkuat persatuan umat Islam yang pada saat itu masih diwarnai oleh berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan. Melalui Shumubu, yang kemudian menjadi cikal bakal Kementerian Agama Republik Indonesia, ia berupaya menjadikan lembaga tersebut sebagai wadah untuk membangun komunikasi, mempererat ukhuwah, serta menjembatani berbagai perbedaan di kalangan umat Islam. Langkah ini mencerminkan komitmennya dalam menjaga persatuan umat sebagai fondasi penting bagi penguatan kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.³

K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan tokoh yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi pesantren, namun dikenal memiliki pemikiran yang moderat, terbuka, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Pandangan tersebut tercermin dalam berbagai gagasan pembaruannya, khususnya di bidang pendidikan Islam. Salah satu bentuk nyata kontribusinya adalah melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari. Pembaruan tersebut diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif melalui

³ Seri Buku Tempo, *Wahid Hasyim Untuk Republik dari Tebuireng*, (Jakarta: KPG-Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), hal. 43.

integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dan tradisi keilmuan pesantren yang telah menjadi karakteristik lembaga tersebut.⁴

K.H. Abdul Wahid Hasyim memandang bahwa sistem pendidikan pesantren yang pada saat itu masih berorientasi pada pengkajian kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) melalui metode *halaqah* perlu dikembangkan agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Menurutnya, pembaruan pendidikan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tradisi keilmuan pesantren, melainkan menyempurnakannya melalui penerapan metode pembelajaran yang lebih sistematis dan interaktif. Gagasan terpenting yang ditawarkannya adalah integrasi mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren. Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tidak seluruh santri bercita-cita menjadi ulama atau kiai, sehingga mereka juga memerlukan bekal ilmu pengetahuan umum sebagai kompetensi untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pendidikan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian. Data penelitian diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen akademik yang membahas konsep pendidikan Islam dan pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim. Seluruh sumber tersebut dikaji secara kritis dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai gagasan-gagasan pendidikan yang dikemukakan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim serta relevansinya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menginterpretasikan pemikiran tokoh berdasarkan kajian teoretis sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai kontribusinya dalam pembaruan pendidikan Islam.

⁴ Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hajim, 1957), hal. 739

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi K.H. Abdul Wahid Hasyim

K.H. Abdul Wahid Hasyim lahir di Desa Tebuireng, Kabupaten Jombang, pada hari Jumat Legi, 5 Rabiul Awal 1333 H yang bertepatan dengan 1 Juni 1914 M. Ia merupakan putra dari K.H. Hasyim Asy'ari yang tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kuat dengan tradisi keilmuan Islam. Dalam beberapa sumber biografi disebutkan bahwa saat dilahirkan ia sempat diberi nama Muhammad Asy'ari sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu anggota keluarganya. Namun, nama tersebut kemudian diubah menjadi Abdul Wahid, yang diambil dari nama salah seorang leluhurnya. Pergantian nama tersebut merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat pada masa itu, yang didasarkan pada pertimbangan keluarga dan keyakinan tertentu, hingga akhirnya nama Abdul Wahid Hasyim dikenal luas sebagai identitas tokoh pembaru pendidikan Islam di Indonesia.⁵

Pada usia sekitar tiga tahun, Abdul Wahid Hasyim dibawa oleh ibunya ke Bangkalan, Madura, untuk menunaikan nazar kepada K.H. Kholil Bangkalan, seorang ulama yang sangat dihormati pada masanya. Perjalanan menuju Bangkalan pada periode tersebut tidak semudah seperti saat ini karena keterbatasan sarana transportasi. Kereta api yang menjadi salah satu moda transportasi utama pada waktu itu sering kali dipadati oleh para pedagang yang kembali dari Surabaya, sehingga perjalanan membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Peristiwa tersebut menggambarkan kuatnya tradisi religius dalam keluarga Abdul Wahid Hasyim sekaligus menunjukkan besarnya penghormatan masyarakat terhadap para ulama sebagai tokoh sentral dalam kehidupan keagamaan.

Dalam beberapa catatan biografi diceritakan bahwa ketika Abdul Wahid Hasyim bersama ibunya tiba di kediaman K.H. Kholil Bangkalan, waktu telah malam dan hujan sedang turun dengan deras. Meskipun demikian, mereka tidak langsung diperkenankan memasuki rumah maupun meninggalkan halaman kediaman tersebut. Demi melindungi putranya yang masih kecil dari hujan, sang ibu sempat meletakkannya di teras atau halaman rumah. Namun, K.H. Kholil meminta agar anak tersebut segera digendong kembali. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi

⁵ Chairul Wahid Septialana dan Deni Hermawan, "Pemikiran Wahid Hasyim Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern," *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)*, Vol. 14, No. 1 (2020), h. 31

bagian dari narasi biografis yang hidup di kalangan masyarakat dan para santri. Dalam tradisi tersebut, kejadian ini dipandang sebagai isyarat atau pertanda akan hadirnya sosok yang kelak memiliki peran besar dalam kehidupan umat, meskipun pemaknaan tersebut merupakan bagian dari tradisi lisan dan keyakinan yang berkembang di lingkungan pesantren.⁶

Pada usia sekitar 25 tahun, K.H. Abdul Wahid Hasyim memasuki kehidupan berkeluarga dengan menikahi Sholehah, putri K.H. Bisri Syansuri, seorang ulama terkemuka, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, yang juga merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama serta pernah menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dari pernikahan tersebut lahir enam orang anak yang terdiri atas empat putra dan dua putri, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yang kemudian lebih dikenal sebagai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Aisyah, Salahuddin Al-Ayyubi, Umar, Khadijah, dan Hasyim. Lingkungan keluarga yang sarat dengan tradisi keilmuan, kepemimpinan, dan perjuangan keislaman tersebut turut memberikan pengaruh penting terhadap lahirnya generasi yang berkontribusi dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan Indonesia.

K.H. Abdul Wahid Hasyim dikenal sebagai seorang ulama yang banyak mengembangkan kapasitas intelektualnya melalui proses belajar secara autodidak sejak usia dini. Ia tidak pernah menempuh pendidikan formal di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selama menimba ilmu di lingkungan pesantren dan madrasah, ia lebih banyak mengembangkan kemampuan belajarnya secara mandiri dengan mendalami berbagai kitab klasik serta literatur berbahasa Arab. Ketekunannya dalam mempelajari syair, sastra, dan ungkapan-ungkapan hikmah berbahasa Arab menjadikannya memiliki kemampuan menghafal yang kuat sekaligus memahami kandungan makna setiap teks secara mendalam. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berwawasan luas, K.H. Abdul Wahid Hasyim juga memiliki kepribadian yang santun, rendah hati, tenang, dan ramah. Karakter tersebut terbentuk melalui tradisi belajar mandiri yang menekankan kedisiplinan, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, serta pembinaan akhlak,

⁶ Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim*, (Jombang Jawa Timur : Pustaka Tebuireng 2015), h.141

sehingga menjadikannya salah satu tokoh pembaru pendidikan Islam yang berpengaruh di Indonesia.⁷

K.H. Abdul Wahid Hasyim juga aktif berkiprah dalam berbagai organisasi Islam yang memiliki peran penting pada masanya. Pada tahun 1939, ia dipercaya menjadi Ketua Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU). Selanjutnya, pada tahun 1940, ia bergabung dalam jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Surabaya dengan menjabat sebagai Ketua Departemen Ma'arif, yang bertanggung jawab terhadap pengembangan bidang pendidikan dalam struktur organisasi NU. Memasuki masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943, Wahid Hasyim diangkat sebagai salah satu pimpinan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai pengganti MIAI untuk menghimpun dukungan umat Islam terhadap kebijakan pemerintah pendudukan. Meskipun lahir dalam konteks politik kolonial, keterlibatan Wahid Hasyim dalam organisasi tersebut menunjukkan peran strategisnya dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam serta mengembangkan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, K.H. Abdul Wahid Hasyim turut berperan dalam proses persiapan kemerdekaan dengan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta terlibat sebagai anggota Panitia Sembilan yang merumuskan dasar-dasar penting bagi berdirinya negara Indonesia. Setelah kemerdekaan, kiprahnya dalam pemerintahan semakin berkembang hingga dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam beberapa periode, yaitu pada tahun 1945, 1949–1950, 1950–1951, dan 1951–1952. Kontribusinya yang besar terhadap pengembangan kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam berakhir ketika ia wafat pada usia 39 tahun akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Cimahi pada 19 April 1953. Saat itu, ia sedang melakukan perjalanan darat menuju Sumedang untuk menghadiri pembukaan konferensi Nahdlatul Ulama. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, umat Islam, dan bangsa Indonesia. Berbagai media, baik nasional maupun internasional, memberitakan wafatnya sebagai kehilangan besar karena K.H. Abdul

⁷ Dewi Wahyuto Sejati, Konsep Pendidikan Islam Menurut Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim, Jurnal Miftahul Ilmi, Vol. 2, No. 1 (2025), h. 207

Wahid Hasyim dikenal sebagai tokoh nasional yang memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan pembangunan bangsa.

B. Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim

K.H. Abdul Wahid Hasyim menempatkan ilmu pengetahuan dan akal sebagai unsur yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Menurut pandangannya, Islam tidak hanya menghargai kemampuan berpikir rasional, tetapi juga mendorong umatnya untuk mengkaji, menelaah, dan memahami ajaran agama secara kritis melalui penggunaan akal yang sehat. Dalam perspektif tersebut, logika berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai kebenaran suatu pemikiran atau peristiwa sehingga setiap pengetahuan perlu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Meskipun demikian, beliau juga menegaskan bahwa kemampuan akal manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan kebenaran. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan nilai-nilai agama agar penggunaan akal tetap berada dalam koridor wahyu dan etika Islam. Melalui bimbingan agama, manusia diharapkan mampu menggunakan akal secara proporsional, membedakan antara pertimbangan yang didasarkan pada rasionalitas yang sehat dengan dorongan hawa nafsu, serta mengarahkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁸

Ada Empat Pilar Konsep Pendidikan Islam K.H. Abdul Wahid Hasyim yaitu:⁹

1. Keagamaan

K.H. Abdul Wahid Hasyim menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai ketuhanan dalam proses pendidikan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian material atau kepentingan individual, tetapi harus mampu membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual.

⁸ Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup Kh. A. Wahid Hasyim*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), Cet ke-1 h. 687

⁹ Lulut Julianto dan Siti Choiriyah, Konsep Pendidikan Islam Modern Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 08, No. 1 (2025), h. 342

Gagasan tersebut juga tercermin dalam pandangannya mengenai kemajuan pendidikan yang tidak terbatas pada pendidikan Islam semata, melainkan mencakup kemajuan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang agama maupun jenis lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dipandang sebagai instrumen untuk membangun kualitas bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkarakter. Konsep keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan kebajikan (*virtues*), dan penguatan spiritualitas ini memiliki kesamaan dengan pemikiran dalam tradisi pendidikan klasik, seperti yang dikemukakan Socrates, yang menekankan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai dasar pembentukan pribadi yang utuh.¹⁰

Dalam perspektif K.H. Abdul Wahid Hasyim, proses pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan utama dalam pembentukan kepribadian. Penanaman nilai tersebut bertujuan agar peserta didik tidak berorientasi semata-mata pada kepentingan dan keberhasilan pribadi, melainkan memiliki kesadaran untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan Islam, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut mampu menghadirkan keseimbangan antara pengembangan aspek akademik, pembentukan kebajikan, serta penguatan spiritual peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kepedulian, dan akhlak mulia perlu ditanamkan secara berkelanjutan, disertai dengan penguatan keimanan melalui

¹⁰ Ach. Syaiful, *Konsep Pendidikan Islam KH. A. Wahid Hasyim*, Kariman, Vol. 07, No. 01 (2019), h. 10.

penumbuhan rasa cinta kepada Allah Swt., ketaatan dalam menjalankan segala perintah-Nya, serta komitmen untuk menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beriman, dan bertakwa.

2. Pengembangan Potensi Anak Didik

Pengembangan peserta didik merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan yang berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki setiap individu. Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim, proses pengembangan tersebut perlu didukung dengan pembiasaan budaya membaca sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas intelektual. Peserta didik hendaknya diberikan kebebasan untuk membaca berbagai jenis bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya tanpa pembatasan yang berlebihan dari orang tua, guru, maupun lembaga pendidikan, selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai yang positif. Kebiasaan membaca juga perlu mencakup literatur berbahasa asing agar peserta didik memiliki akses yang lebih luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran global. Dengan demikian, membaca tidak hanya menjadi aktivitas memperoleh informasi, tetapi juga menjadi proses pengembangan cara berpikir kritis, memperkaya perspektif, serta membuka wawasan yang lebih luas sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan kehidupan.

3. Sosial

Nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim tidak hanya diwujudkan dalam hubungan antarsesama umat Islam, tetapi juga tercermin dalam sikap terbuka terhadap komunikasi, kerja sama, dan persahabatan dengan

siapa pun, termasuk mereka yang memiliki latar belakang agama atau keyakinan yang berbeda. Bagi beliau, toleransi merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akidah. Penanaman nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh yang nyata dalam pembentukan karakter peserta didik dan lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran serta praktik kehidupan putranya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dikenal luas sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, dialog, dan toleransi dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim menunjukkan keberlanjutan yang kuat dan tetap relevan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Visi dan misi pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap pembentukan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang utuh, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam sebuah penelitian, Azzet mengemukakan bahwa kecerdasan intelektual hanya memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap keberhasilan seseorang, sedangkan sekitar 80% lainnya dipengaruhi oleh kemampuan mengelola kecerdasan emosional dan spiritual. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu mengintegrasikan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan spiritual secara proporsional agar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam

penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kematangan emosional, integritas moral, serta kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai agama.¹¹

4. Semangat Kebangsaan

Pada hakikatnya, Indonesia didirikan di atas prinsip persatuan dalam keberagaman yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat tersebut tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menggambarkan komitmen untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan golongan. Gagasan ini sejalan dengan pandangan K.H. Abdurrahman Wahid yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila telah hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai dasar kebersamaan. Nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme sesungguhnya telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan dan menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas bangsa. Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip tersebut juga memperoleh landasan yang kuat melalui praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika membangun masyarakat Madinah. Melalui pendidikan yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan, kerja sama, dan tanggung jawab kolektif, Nabi membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara (*hubbul wathan*) sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Kedudukan K.H. Abdul Wahid Hasyim sebagai seorang ulama tidak menjadikannya hanya berfokus pada persoalan keagamaan, tetapi juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹¹ Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h 47-49.

Dalam pemikirannya, nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan semangat kebangsaan sehingga agama dan negara tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pandangan tersebut mencerminkan kuatnya sikap nasionalisme yang dimiliki K.H. Abdul Wahid Hasyim, yaitu kecintaan dan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Kohn yang mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada bangsa dan negara (*nation-state*), sehingga setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara persatuan, memperjuangkan kepentingan bersama, dan mengabdikan dirinya bagi kemajuan bangsa.¹²

C. Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim Dengan Perkembangan Pendidikan Masa Kini

K.H. Abdul Wahid Hasyim berhasil mewarisi sekaligus mengembangkan tradisi intelektual yang diwariskan oleh ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal secara panjang sebagaimana sebagian tokoh pada masanya, beliau mampu membangun kapasitas intelektual melalui pembelajaran mandiri, pengalaman organisasi, serta interaksi dengan berbagai kalangan. Kemampuan tersebut mengantarkannya menjadi pemimpin organisasi sosial dan politik, berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa kualitas intelektual tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh semangat belajar, keluasan wawasan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim memiliki karakter progresif dan berorientasi pada masa depan, terutama dalam bidang pendidikan. Beliau

¹² Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, (Jakarta : Erlangga, 1985), h 11.

memandang bahwa kemajuan umat tidak mungkin dicapai hanya dengan menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan umum serta kemampuan berbahasa asing sebagai sarana untuk mengakses perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Pandangan tersebut diwujudkan secara nyata dalam praktik pendidikan di lingkungan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di lembaga modern tanpa mengabaikan pendidikan agama sebagai fondasi moral, intelektual, dan spiritual. Melalui pendekatan tersebut, beliau berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga lahir generasi yang memiliki keseimbangan antara religiositas dan kompetensi akademik.

Gagasan pembaruan pendidikan yang dikembangkan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim tetap relevan sebagai salah satu rujukan dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang cendekiawan Muslim yang memiliki penguasaan mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman serta wawasan yang terbuka terhadap perkembangan zaman, beliau berupaya melakukan pembenahan sistem pendidikan setelah memperdalam studi keagamaan di Makkah. Sekembalinya ke tanah air, perhatian beliau tertuju pada upaya memodernisasi pendidikan, khususnya pendidikan Islam, agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas keislamannya. Upaya tersebut lahir bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai Menteri Agama, melainkan didorong oleh tanggung jawab moral dan komitmennya sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, K.H. Abdul Wahid Hasyim tidak hanya dikenal sebagai pemikir pendidikan, tetapi juga sebagai pelaku pembaruan yang mampu mengimplementasikan gagasan-gagasannya sesuai dengan tuntutan kondisi sosial, budaya, dan pendidikan pada zamannya.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi ketimpangan dalam pengembangan aspek keilmuan dan pembentukan karakter. Lembaga pendidikan umum cenderung lebih menitikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, sementara penguatan nilai-nilai keagamaan sering kali belum memperoleh porsi yang seimbang. Sebaliknya, sebagian lembaga pendidikan keagamaan masih lebih berfokus pada pendalaman ilmu-ilmu agama dengan perhatian yang relatif terbatas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pendidikan belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku dan karakter masyarakat secara optimal karena indikator keberhasilan lebih banyak diukur berdasarkan capaian akademik dan penguasaan ilmu pengetahuan daripada internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pembaruan pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai agama secara harmonis sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih seimbang, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki daya saing di era modern.¹³

K.H. Abdul Wahid Hasyim memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembaruan pendidikan Islam dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia melalui berbagai gagasan yang bersifat inovatif. Salah satu langkah pembaruannya adalah melakukan transformasi metode pembelajaran di pesantren dengan menggeser sistem tradisional *wetonan* dan *bandongan* menuju pendekatan yang lebih interaktif, dialogis, dan berpusat pada keaktifan santri. Selain itu, beliau mendorong integrasi ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulum pesantren sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara penguasaan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan modern. Menurutnya, tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata mencetak ulama, tetapi juga membekali santri dengan kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti penguasaan bahasa asing, keterampilan administrasi, termasuk kemampuan mengetik, serta berbagai kecakapan hidup yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tingkat nasional, K.H. Abdul Wahid Hasyim juga memperjuangkan masuknya pendidikan agama ke dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, keterampilan, dan nilai-nilai keagamaan.

Upaya K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam memperkuat posisi pendidikan agama di Indonesia membuahkan hasil melalui lahirnya kebijakan pemerintah yang menetapkan pendidikan agama sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Salah satu pencapaian penting tersebut adalah diterbitkannya peraturan pada 21 Januari 1951 melalui Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Agama dan Kementerian

¹³ Shofiyullah Mz, *K.H. A. Wahid Hasyim, Sejarah Pemikiran, dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa*, (Yogyakarta: Pesantren Tebuireng, 2011), h. 280

Pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa mata pelajaran agama wajib diberikan kepada peserta didik mulai kelas IV sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah dengan alokasi waktu dua jam pelajaran setiap minggu. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan nasional karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan ke dalam proses pendidikan formal, sekaligus mencerminkan besarnya kontribusi K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam memperjuangkan keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia.

Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim mengenai pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang dalam perkembangannya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), menunjukkan visinya dalam membangun sistem pendidikan tinggi Islam yang integratif. Beliau memandang bahwa pendidikan tinggi Islam tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga harus mengakomodasi ilmu pengetahuan umum agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik, wawasan luas, dan karakter religius. Gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan pendidikan nasional sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa melalui integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Pemikiran ini memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat.¹⁴

Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim, integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama merupakan konsep yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Beliau berpandangan bahwa pencarian ilmu pengetahuan tidak

¹⁴ Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2006), h.8

seharusnya dibatasi oleh pemahaman keagamaan yang sempit maupun kepentingan politik, karena Islam mendorong umatnya untuk terus belajar sepanjang hayat dan menuntut ilmu dari berbagai sumber. Prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Islam yang memotivasi setiap individu untuk menuntut ilmu sejak usia dini hingga akhir hayat serta membuka diri terhadap perkembangan pengetahuan di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, Islam tidak membatasi ruang lingkup pembelajaran hanya pada ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga memberikan penghargaan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi kehidupan. Meskipun demikian, K.H. Abdul Wahid Hasyim tetap menegaskan bahwa pendidikan agama harus menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan, karena nilai-nilai keislaman berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual dalam mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim mengenai pendidikan Islam dibangun atas empat pilar utama yang saling melengkapi dalam membentuk pribadi peserta didik secara utuh. Pilar pertama adalah keagamaan, yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi pendidikan melalui penguatan keimanan, kecintaan kepada Allah Swt., ketaatan dalam menjalankan perintah-Nya, serta komitmen untuk menjauhi segala larangan-Nya. Pilar kedua adalah pengembangan potensi peserta didik, yaitu upaya mengoptimalkan kemampuan individu melalui pembiasaan budaya membaca dan belajar secara luas sesuai dengan minat serta bakat peserta didik, tanpa adanya pembatasan yang menghambat perkembangan intelektualnya, selama tetap berlandaskan nilai-nilai yang positif. Pilar ketiga adalah penguatan dimensi sosial, yang berorientasi pada pembentukan kecerdasan emosional melalui kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menghargai sesama, memiliki kepedulian sosial, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Adapun pilar keempat adalah semangat kebangsaan, yaitu penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap keberagaman sebagai karakter utama warga negara.

Relevansi pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim terhadap konsep pendidikan Islam pada masa kini masih sangat kuat dan memiliki nilai implementatif dalam

menjawab berbagai tantangan pendidikan. Gagasan beliau yang berlandaskan pada empat pilar, yaitu keagamaan, pengembangan potensi peserta didik, kesadaran sosial, dan semangat kebangsaan, tetap selaras dengan kebutuhan pendidikan yang menekankan keseimbangan antara pembentukan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, konsep integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang dikemukakan K.H. Abdul Wahid Hasyim tetap relevan sebagai paradigma pengembangan pendidikan Islam yang adaptif, holistik, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Atjeh, Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hajim, 1957.
- Atjeh, Aboebakar, *Sejarah Hidup Kh. A. Wahid Hasyim*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Azzet, Akhmad Muhaimin, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2006.
- Gunawan, Heri, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Julianto, Lulut dan Siti Choiriyah, Konsep Pendidikan Islam Modern Menurut K.H. Abdul Wahid Hasyim, AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, Vol. 08, No. 1 (2025), h. 342
- Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Mansur dkk, *Rekonsruksi Sejarah Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2005.
- Mz, Shofiyullah, *K.H. A. Wahid Hasyim, Sejarah Pemikiran, dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa*, Yogyakarta: Pesantren Tebuireng, 2011.
- Sejati, Dewi Wahyuto, Konsep Pendidikan Islam Menurut Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim, Jurnal Miftahul Ilmi, Vol. 2, No. 1 (2025), h. 207

Septialana, Chairul Wahid dan Deni Hermawan, “Pemikiran Wahid Hasyim Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern,” *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)*, Vol. 14, No. 1 (2020), h. 31

Seri Buku Tempo, *Wahid Hasyim Untuk Republik dari Tebuireng*, Jakarta: KPG-Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.

Syaiful, Ach, *Konsep Pendidikan Islam KH. A. Wahid Hasyim*, Kariman, Vol. 07, No. 01 (2019), h. 10.